

Model pemajakan atas transaksi e-commerce: Pembelajaran dari Jepang dan Amerika Serikat

Herry Suwondo, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=128637&lokasi=lokal>

Abstrak

Perkembangan teknologi yang cukup pesat khususnya jaringan internet yang secara luas telah digunakan oleh sebagian besar masyarakat di belahan dunia telah membuka kesempatan untuk berbagai kegiatan diantaranya adalah transaksi perdagangan. Perdagangan elektronik didefinisikan sebagai cara untuk menjual dan membeli barang-barang (dan jasa) lewat jaringan internet. Perdagangan elektronik mencakup transaksi pembelian serta transfer dana lewat jaringan komputer. Pengertian di atas tidak sepenuhnya merupakan definisi tunggal tentang sistem ini hal ini disebabkan karena hampir setiap saat muncul bentuk-bentuk baru dari e-commerce yang tidak hanya terfokus pada jual-beli online. Walaupun pada prakteknya sistem perdagangan elektronik ini umumnya dilakukan dalam bidang retail seperti misalnya jual-beli buku, compact disk, peralatan elektronik dan barang-barang atau jasa-jasa lainnya melalui situs-situs toko online. Jepang adalah sebuah negara dengan tingkat penerapan teknologi informasi yang cukup tinggi dimana masyarakatnya memanfaatkan internet sebagai sarana perdagangan. Berbagai kebijakan telah diterapkan oleh otoritas perpajakan di Jepang dalam rangka menjangkau transaksi perdagangan elektronik, diantaranya membentuk suatu badan khusus untuk memantau kegiatan transaksi elektronik dan menggali potensi pajaknya.

Demikian juga dengan negara Australia dimana penduduknya menganggap perdagangan elektronik adalah transaksi yang memberi banyak kemudahan dan keragaman produk yang ditawarkan. Hal ini membuat transaksi e-commerce semakin tumbuh dengan cepat dan menjadi bagian dari kehidupan bahkan kebiasaan penduduk Australia. Pihak otoritas perpajakan di Australia memberikan perhatian yang besar terhadap perkembangan transaksi elektronik dengan memberikan definisi yang jelas akan transaksi yang dilakukan serta peraturan terkait transaksi lintas negara.

Di Indonesia transaksi perdagangan elektronik masih tergolong baru namun perkembangannya cukup pesat. Sebagaimana diketahui bahwa usaha ini memiliki ciri dan kerumitan tersendiri dalam operasional usahanya sehingga diperlukan pengetahuan dan pengalaman dalam menentukan pengenaan pajaknya. Sejauh ini peraturan perpajakan yang ada belum mengatur secara detail atas transaksi perdagangan elektronik. Hal ini sangat diperlukan menyangkut pengenaan pajak atas transaksi elektronik dan kepastian hukum atas transaksi yang dilakukan. Oleh sebab itu penelitian ini dilakukan untuk memberikan kontribusi pemikiran atas aspek pajak dan kebijakan-kebijakan yang perlu dilakukan untuk menggali potensi perdagangan elektronik. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah pendekatan kualitatif dengan melakukan study literatur, study lapangan dengan cara melakukan wawancara dari berbagai nara sumber yang berkompeten sehingga diharapkan diperoleh kesimpulan yang signifikan. Dalam penelitian ini juga dilakukan dengan cara membandingkan keadaan yang ada dengan pembanding yang sudah ada (comparative study) sehingga diperoleh hal-hal yang diharapkan dapat diterapkan/diaplikasikan dalam rangka penggalan potensi atas transaksi perdagangan elektronik.

Dari hasil penelitian dengan menggunakan metode di atas diperoleh simpulan bahwa Indonesia belum

menerapkan aturan secara mendetail dan belum melakukan langkah-langkah pengawasan dan penggalian atas transaksi perdagangan elektronik sebagaimana yang telah dilakukan negara Australia dan Jepang.

Oleh sebab itu disarankan agar pihak otoritas perpajakan di Indonesia melakukan langkah-langkah seperti yang dilakukan oleh kedua negara tersebut (Jepang dan Australia) yakni memberikan pengertian yang rinci dan mendetail atas kegiatan perdagangan elektronik dan melakukan langkah-langkah nyata untuk melakukan pengawasan atas transaksi elektronik tersebut dalam rangka meningkatkan penerimaan dari sektor perpajakan.

<hr>

The Growth of technology specially internet network which widely have been applied by most public in the world have opened opportunity for various activities such as electronic-commerces transaction. Electronic commerce is defined as mode for selling and buy goods (and services) through the internet network.

Electronic commerce include purchasing transaction and also fund transfer through the computer network.

The definition above not fully is single definition concerning this system it is caused by approximant every

time of new forms emergence from not e-commerces only focused at online merchants. Although at the practice of this Electronic commerce system generally done in the field of retail is like for example book merchant, compact disk, equipments of other services or goods and electronic by the online shops websites.

Japan is a state with a high level of technology aplication where the public exploit nternet as supporting facilities for commerce. Various policies have been applied by taxation authoritieses in Japans for the agenda of reaching transaction of Electronic commerces, by forming a special bodies for watching activity of electronics transactions and the taxes potency exploration.

And so it is with The Australian where the resident assume Electronic commerce is a kind of transaction giving many amenities and variance of products which on the market. This thing make e-commerce transaction progressively grow swiftly and become part of life even habit of Australian resident. The side of taxation authorities in Australian give big attention to growth of electronic transaction by giving clear transaction definition to which done and also related/relevant regulation of a cross-border transactions.

In Indonesia, E-commerce is a new kind of transaction but the growth is fast enough. As known that this effort have separate complication and characteristic in the effort operational causing required by knowledge and experience in determining imposition of the tax. So far the taxation not yet arrange the regulation in detail to the transaction of Electronic commerce. This thing hardly required concerning imposition of tax to rule of law and electronic transaction. On that account this research done to give contribution of idea to the policys and tax aspect needing done to dig potency of The e-commerces.

Approach of research which applied in this thesis is qualitative approach by doing study literature, study field by the way of doing interview from various resource persons which competences causing expected obtained significant conclusion. In this research also done by the way of comparing the situation with comparator which have applied for the agenda to explore the potency of e-commerce transaction.

From research result by using methods explained above is known that Indonesia not yet apply order in detail and not yet do observation stages and dig of to transaction of Electronic commerce as which have been done by Australia and Japan. On that account suggested that the Indonesian taxation authorities do stages as have done both the state (Japan and Australian) namely give understanding which detail and clearly to the e-commerce activity and do reality stages for doing observation to the electronic transaction for the agenda of increasing acceptance from taxation sector.